BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Pajak atas UMDS di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat mencerminkan suatu sistem yang terstruktur dan akuntabel, di mana pemotongan pajak tidak dilakukan saat pencairan awal dana, melainkan setelah proses pertanggungjawaban selesai. Hal ini bertujuan agar besaran pajak yang dipotong benar-benar mencerminkan nilai realisasi pengeluaran yang sesungguhnya, bukan sekadar estimasi. Proses ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Penerapan sistem perpajakan berbasis realisasi ini memberikan banyak manfaat, termasuk dalam hal efisiensi administrasi dan pengendalian internal. Dengan menunda pengenaan pajak hingga tahap akhir, perusahaan dapat lebih tepat dalam menentukan jenis pajak yang relevan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, atau PPh Final (Pasal 4 ayat 2), sesuai dengan jenis kegiatan atau transaksi. Masing-masing jenis pajak dikenakan berdasarkan dasar pengenaan dan tarif yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dari sisi pengendalian internal dan akuntabilitas, sistem ini memperkuat kontrol perusahaan terhadap penggunaan dana operasional. Proses verifikasi dokumen, validasi transaksi, serta pengawasan atas penyetoran pajak yang dilakukan oleh pemohon, menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Langkah ini juga memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

benar tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun dalam pemeriksaan eksternal seperti audit atau review pajak.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan atas UMDS yang berbasis pada realisasi pertanggungjawaban memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan dana perusahaan secara profesional. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat telah membangun fondasi yang baik dalam penerapan kebijakan ini, yang tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan pajak, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan perusahaan. Keberhasilan penerapan sistem ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara bagian keuangan, pemohon dana, serta unit pengawasan internal dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pajak UMDS di PT KAI, perlu adanya peningkatan pemahaman pegawai serta penguatan sistem administrasi perpajakan. Berikut beberapa saran yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi hal tersebut.

1. Peningkatan Pemahaman Perpajakan bagi Pemohon Dana

   PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi internal terkait ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan UMDS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai, terutama pemohon dana, mengenai jenis pajak yang dikenakan, dasar pengenaan pajak, serta kewajiban pelaporan dan penyetorannya. Dengan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pemahaman yang baik, pengajuan dan pertanggungjawaban dana jadi lebih tertib dan risiko kesalahan serta sanksi pajak berkurang.

2. Penguatan Sistem Administrasi Perpajakan UMDS

   PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya terus memperkuat sistem administrasi perpajakan yang berkaitan dengan UMDS, dengan menekankan pada kepatuhan, ketepatan waktu, dan efisiensi proses. Prosedur pelaporan dan penyetoran pajak harus distandarisasi dengan dokumentasi yang mudah diakses dan terintegrasi. Penggunaan sistem digital internal dapat membantu memantau pelaporan dan mengurangi kesalahan administratif.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA